PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19710729 199302 1 003

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

TAHUN 2024

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROVINSI RIAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat karunia-Nya penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi Riau dapat diselesaikan. LKjIP disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas PTPH Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Semoga LKjIP Dinas PTPH Provinsi Riau Tahun 2024 dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja pada masa mendatang.

Plt. KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU,

MUHAMMAD JOB KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19750528 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. STRUKTUR ORGANISASI 3

1.3. TUGAS DAN FUNGSI 4

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 9

1.5. PERMASALAHAN UTAMA 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA 24

2.1. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 24

2.2. PERJANJIAN KINERJA Tahun 2024 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28

BAB IV PENUTUP 83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai DPTPH berdasarkan Golongan 10
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai DPTPH berdasarkan Golongan 10
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai DPTPH berdasarkan Pendidikan 10
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai DPTPH berdasarkan Jenis Kelamin 11
Tabel 1. 5 Jumlah Sarana dan Prasarana serta Aset 11
Tabel 1. 6 Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Lalu 20

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Dinas PTPH Riau 24
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas 27

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Indeks Ketahanan Pangan 28
Tabel 3. 2 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 dan 2024 28
Tabel 3. 3 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan dengan Target Tahun Akhir Renstra 28
Tabel 3. 4 Capaian IKP Se-Indonesia 29
Tabel 3. 5 IKP Per Kab/Kota 30
Tabel 3. 6 Nilai Indeks Kab/Kota di Provinsi Riau 30
Tabel 3. 7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 38
Tabel 3. 8 Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya sistem ketahanan pangan 38
Tabel 3. 9 Capaian Indikator Produksi Tanaman Pangan Hortikultura 41
Tabel 3. 10 Perbandingan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura Tahun 2023 dan 2024 42
Tabel 3. 11 Perbandingan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura Tahun 2024 dan Target Tahun Akhir Renstra 43
Tabel 3. 12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 46
Tabel 3. 13 Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura 47
Tabel 3. 14 Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD 55

Tabel 3. 15 Perbandingan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura Tahun 2023 dan 2024 56
Tabel 3. 16 Rincian uraian peningkatan bobot 57
Tabel 3. 17 Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2023 dengan Target Tahun Akhir Renstra 58
Tabel 3. 18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 60
Tabel 3. 19 Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja 61
Tabel 3. 20 Realisasi Kinerja dan Anggaran 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau..... 8

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang mendorong setiap instansi pemerintah dalam bertanggung jawab akan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program serta kegiatan. Akuntabilitas kinerja yang baik dan terpercaya (good governance) juga menjadi suatu prasyarat dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP mempunyai peran penting dalam menjadi alat kendali dalam memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam pencapaian visi misi pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada setiap perangkat daerah (PD) atas penggunaan seluruh sumber dayanya; meliputi sumber daya manusia (*Human Resourches*), sarana prasarana , serta anggaran (*Fund*) yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran berlangsung.

Pada Tahun 2024, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.694.175.091,00 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Riau. Hal tersebut di atas merupakan target capaian yang tertuang pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2019-2024, serta Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2024.

Atas penjabaran tugas dan fungsi tersebut, serta memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mewujudkan Peraturan Dubernur Riau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka DPTPH Provinsi Riau berkewajiban dalam pelaksanaannya untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini juga memuat ikhtisar pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah. Laporan Kinerja ini juga akan menjelaskan capaian kinerja tahun berjalan, perbandingan kinerja antara capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, perbandingan antara capaian kinerja tahun berjalan dengan target kinerja lima tahun yang tertuang pada dokumen Renstra, serta analisis penyebab keberhasilan serta kegagalan dalam pencapaian kinerja baik pada skala program maupun kegiatan pada tahun berjalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 meliputi 4 segmen naratif; BAB I PENDAHULUAN memuat penjabaran latar belakang dan aspek strategis yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), BAB II PERENCANAAN KINERJA mengurai penjelasan terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah serta pecapaian kinerja pada tahun sebelumnya, BAB III AKUNTABILITAS KINERJA memuat pengukuran dan formulasi terkait capaian kinerja serta analisis-analisis yang diperlukan dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja perangkat daerah, dan BAB IV PENUTUP sebagai konklusi dari pengukuran yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau merupakan Perangkat Daerah yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.

Pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau terdapat Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan dalam Pergub No.42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau menyebutkan bahwa unit kerja yang terdapat pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Perangkat Daerah Provinsi Riau memiliki 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan ditunjang oleh 4 (Empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

a. Sekretariat terdiri dari:
    1) Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
b. Bidang Ketahanan Pangan
c. Bidang Tanaman Pangan
d. Bidang Hortikultura
e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, yang terdiri dari :

a. UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan :
    1) Sub Bagian Tata Usaha;
    2) Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;
    3) Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;
    4) Kelompok Jabatan Fungsional.
b. UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
    1) Sub Bagian Tata Usaha;
    2) Seksi Pelatihan;
    3) Seksi Penyuluhan;
    4) Kelompok Jabatan Fungsional.
c. UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
    1) Sub Bagian Tata Usaha;
    2) Seksi Produksi Benih;
    3) Seksi Pengawasan dan Sertifikasi;
    4) Kelompok Jabatan Fungsional;
d. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
    1) Sub Bagian Tata Usaha;
    2) Seksi Perlindungan Tanaman;
    3) Seksi Pengujian pupuk, pestisida dan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan;
    4) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. T

UGAS DAN FUNGSI

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang ketahanan pangan, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan Bidang Prasarana, Sarana dan Pertanian serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang

dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Masing-masing unit kerja tersebut di atas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kesekretariatan
    - Pelaksanaan kegiatan terkait pemeliharaan Gedung kantor
    - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
    - Pelaksanaan administrasi terkait surat menyurat dan kepegawaian

2. Bidang Ketahanan Pangan
    - Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,
    - pelaksanaan kegiatan pendukung ketahanan pangan
    - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

3. Bidang Tanaman Pangan
    - Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,
    - pelaksanaan kegiatan pendukung peningkatan produktivitas tanaman pangan
    - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

4.Bidang Hortikultura

    - Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,
    - pelaksanaan kegiatan pendukung peningkatan produktivitas hortikultura
    - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

5. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
    - Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,
    - pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian
    - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

6. Unit Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A).
    - Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan
    - Koordinasi dan fasilitasi
    - Pembinaan teknis kegiatan, pembinaan dan penumbuhan penangkar benih, serta pengembangan teknologi perbanyakan benih
    - Pemeliharaan benih sumber, koleksi dan plasma nutfah
    - Pemberian pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura
    - Pengawasan terhadap mutu benih tanaman dan hortikultura yang beredar, pengecekan mutu benih dan memonitor data stok dan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura pada produsen dan pedagang benih
    - Pemantauan dan evaluasi kegiatan

5. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A).
    - Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan
    - Koordinasi dan fasilitasi
    - Pelayanan masyarakatterkait proteksi atau perlindungan Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
    - Pemantauan dan evaluasi kegiatan

6. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian (Kelas A)
    - Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan
    - Koordinasi dan fasilitasi
    - Penyediaan bantuan di bidang pelatihan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)
    - Pengelolaan system informasi manajemen pengembangan SDM Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
    - Pengembangan standarisasi dan sertifikasi SDM tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
    - Pemantauan dan evaluasi

7. Kelompok Jabatan Fungsional

   Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang dan UPT dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisnya.

Bagan Organisasi DPTPH adalah sebagai berikut :

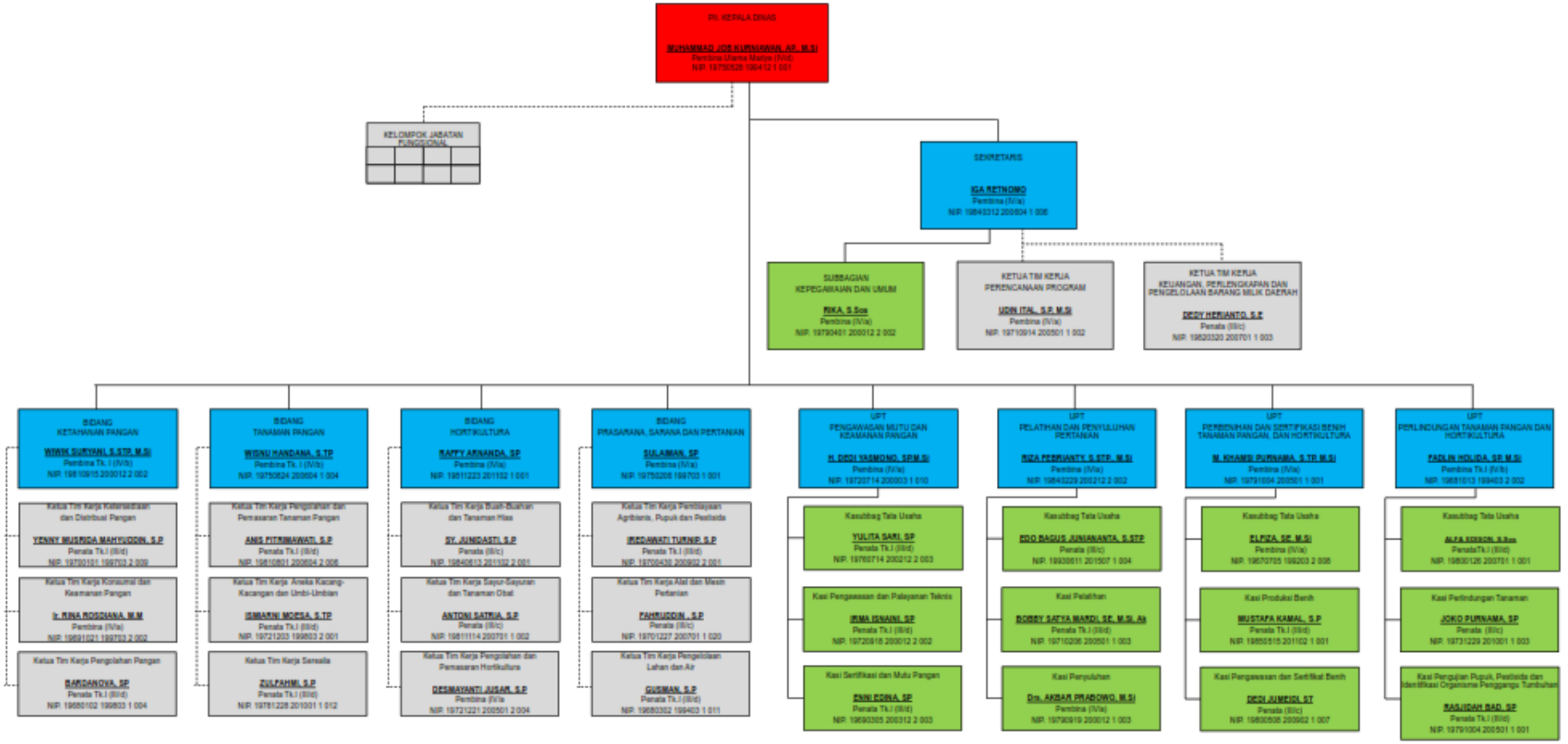

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1.4.1 Eksternal

Dinas PTPH Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pangan dan pertanian. Untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, maka Dinas PTPH Provinsi Riau berperan dalam mendukung misi Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat empat sub urusan Pemerintah Provinsi di Bidang Pangan, dengan kewenangan sebagai berikut :

1. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan.
2. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya.
3. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan provinsi.
4. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan pemerintah pusat.
5. Promosi pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.
6. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kab/kota.
7. Penanganan kerawanan pangan provinsi.
8. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 daerah Kab/Kota dalam 1 provinsi.
9. Pelaksanaan pengawasan kemanan pangan segar distribusi lintas daerah Kab/Kota.

Pada Bidang Pertanian, kewenangan Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan peredaran sarana pertanian,
2. penertiban sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman
3. Penataan prasarana pertanian
4. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi

5. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 provinsi

1.4.2 Internal

1.4.2.1. Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian

Pegawai DPTPH pada Desember 2024 yaitu sejumlah 280 orang yang terdiri dari 252 orang PNS dan 28 orang PPPK.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai DPTPH berdasarkan Golongan

STRUKTURAL			FUNGSIONAL				JUMLAH
			KHUSUS			UMUM	
ESELON II	ESELON III	ESELON IV	MADYA	MUDA	PERTAMA	PELAKSANA	
1	9	13	44	70	93	50	280

Jumlah Pegawai Berdasarkan Gol adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai DPTPH berdasarkan Golongan

NO	GOL/RUANG	JUMLAH
1	Golongan IV	45
2	Golongan III	164
3	Golongan II	43
4	Golongan I	0
	JUMLAH	**252**

Jumlah Pegawai Berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai DPTPH berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	2
2	SLTP	4
3	SLTA	62
4	DIPLOMA/D-III	23
5	SARJANA S1/D-IV	155
6	SARJANA S2	34
	JUMLAH	280

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai DPTPH berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	151
2	PEREMPUAN	129
	JUMLAH	280

1.4.2.2. Anggaran Tahun 2024

Pagu Anggaran Dinas PTPH pada tahun 2024 Rp 121.694.175.091,00 dengan realisasi fisik 93,72% dan keuangan Rp 104.534.276.602,73 (85,90%).

1.4.2.3. Sarana Prasarana dan Aset

Tabel 1. 5 Jumlah Sarana dan Prasarana serta Aset

RINCIAN OBJEK	URAIAN	UNIT
	ASET TETAP	**4595**
	Tanah	**21**
	Tanah	**21**
01	Tanah Persil	14
02	Tanah Non Persil	7
03	Lapangan	
	Peralatan dan Mesin	**4134**
	Alat-Alat Besar	**64**
01	Alat-Alat Besar Darat	5
02	Alat-Alat Besar Apung	
03	Alat-Alat Bantu	59
	Alat-Alat Angkutan	**105**
01	Alat Angkutan Darat Bermotor	98
02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7
03	Alat Angkut Apung Bermotor	
04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
05	Alat Angkut Bermotor Udara	
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	**307**
01	Alat Bengkel Bermesin	59

RINCIAN OBJEK	URAIAN	UNIT
02	Alat Bengkel Tak Bermesin	81
03	Alat Ukur	167
	Alat Pertanian	**162**
01	Alat Pengolahan	162
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	**2612**
01	Alat Kantor	399
02	Alat Rumah Tangga	1177
03	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	1036
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	**122**
01	Alat Studio	106
02	Alat Komunikasi	8
03	Peralatan Pemancar	8
04	Peralatan Komunikasi Navigasi	
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	**0**
01	Alat Kedokteran	0
02	Alat Kesehatan Umum	
	Alat Laboratorium	**348**
01	Unit Alat Laboratorium	346
02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
03	Alat Peraga Praktek Sekolah	2
04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya (BATAM)	
07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	
	Alat Persenjataan	**0**
01	Senjata Api	
02	Persenjataan Non Senjata Api	0
03	Senjata Sinar	
04	Alat Khusus Kepolisian	
	Komputer	**412**
01	Komputer Unit	191
02	Peralatan Komputer	221
	Alat Eksplorasi	**0**
01	Alat Eksplorasi Topografi	
02	Alat Eksplorasi Geofisika	

RINCIAN OBJEK	URAIAN	UNIT
	Alat Pengeboran	**0**
01	Alat Pengeboran Mesin	
02	Alat Pengeboran Non Mesin	
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	**0**
01	Sumur	
02	Produksi	
03	Pengolahan dan Pemurnian	
	Alat Bantu Eksplorasi	**0**
01	Alat Bantu Eksplorasi	
02	Alat Bantu Produksi	
	Alat Keselamatan Kerja	**0**
01	Alat Deteksi	
02	Alat Pelindung	
03	Alat SAR	
04	Alat Kerja Penerbangan	
	Alat Peraga	**0**
01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	
	Peralatan Proses/Produksi	**0**
01	Unit Peralatan Proses/Produksi	
	Rambu-Rambu	**2**
01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2
02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	
	Peralatan Olahraga	**0**
01	Peralatan Olahraga	0

	Gedung dan Bangunan	**293**
	Bangunan Gedung	**240**
01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	173
02	Bangunan Gedung Tempat Timggal	67
	Monumen	**0**
01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0
	Bangunan Menara	**0**
01	Bangunan Menara Perambulan	0
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	**53**
01	Tugu/Tanda Batas	53

	Jalan, Jaringan dan Irigasi	**144**
	Jalan dan Jembatan	**32**

RINCIAN OBJEK	URAIAN	UNIT
01	Jalan	25
02	Jembatan	7
	Bangunan Air	**70**
01	Bangunan Air Irigasi	34
02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	2
03	Bangunan Air Pengembangan Rawa dan Poder	0
04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulan Bencana Alam	12
05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	10
06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	10
07	Bangunan Air Kotor	2
	Instalasi	**24**
01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	5
02	Instalasi Air Kotor	1
03	Instalasi Pengolahan Sampah	
04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
05	Instalasi Pembangkit Listrik	5
06	Instalasi Gardu Listrik	9
07	Instalasi Pertahanan	0
08	Instalasi Gas	
09	Instalasi Pengaman	
10	Instalasi Lain	4
	Jaringan	**18**
01	Jaringan Air Minum	11
02	Jaringan Listrik	3
03	Jaringan Telepon	4
04	Jaringan Gas	

	Aset Tetap Lainya	**3**
	Bahan Perpustakaan	**1**
01	Bahan Perpustakaan Tercetak	1
02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	
03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	0
04	Musik	
05	Karya Grafika (Graphic Material)	
06	Three Dimensional Artefacs and Realita	
07	Tarscalt	
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	**2**

RINCIAN OBJEK	URAIAN	UNIT
01	Barang Bercorak Kesenian	0
02	Alat Bercorak Kebudayaan	2
03	Tanda Penghargaan	
	Hewan	**0**
01	Hewan Piaraan	
02	Ternak	0
03	Hewan Lainnya	
	Biota Perairan/Ikan	**0**
01	Ikan Bersirip (Pisces)	
02	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)	
03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)	
04	Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	
05	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)	
06	Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	
07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)	
08	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)	
09	Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)	
10	Biota Perairan Lainnya	
	Tanaman	**0**
01	Tanaman	0
	Barang Koleksi Non Budaya	**0**
01	Barang Koleksi Non Budaya	
	Aset Tetap Dalam Renovasi	**0**
01	Aset Tetap Dalam Renovasi	

	Konstruksi Dalam Pengerjaan	**0**
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	**0**
01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0

	Akumulasi Penyusutan	**0**
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	**0**
01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	
02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	
03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	
04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	

RINCIAN OBJEK	URAIAN	UNIT
05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	
06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	
08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	
09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	
10	Akumulasi Penyusutan Alat Komputer	
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	
13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	
17	Akumulasi Penyusutan Alat Peralatan Proses/Produksi	
18	Akumulasi Penyusutan Alat Rambu-Rambu	
19	Akumulasi Penyusutan Alat Peralatan Olahraga	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	**0**
01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	
02	Akumulasi Penyusutan Monumen	
03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	
04	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	**0**
01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	
02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	
03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	
04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	**0**
01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	

	ASET LAINNYA	**6336**

	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	**0**
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	**0**
01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	

	Aset Tidak Berwujud	**10**
	Aset Tidak Berwujud	**10**

RINCIAN OBJEK	URAIAN	UNIT
01	Aset Tidak Berwujud Lainnya	10

	Aset Lain-Lain	**6326**
	Aset Lain-Lain	**6326**
01	Aset Lain-Lain	6326

	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**0**
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**0**
01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	

	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	**0**
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	**0**
01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0

1.5. P

ERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Riau berdasarkan Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah Provinsi Riau belum mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Hal ini disebabkan karena beberapa masalah yakni :

1) Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan. Standar konsusmsi energi yang ditetapkan oleh Widya Karya Pangan dan Gizi (WKPG) yakni 2.000 Kkalori/kapita/hari, sedangkan konsumsi protein 52 gram/kapita/hari. Sementara kemampuan produksi beras terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat tidak berbanding lurus bahkan cenderung semakin menurun. Pemanfaatan potensi pangan local seperti kelompok umbi-umbian dan pati sebagai diversifikasi pangan diharapkan dapat mengurangi angka konsumsi pangan pokok beras di Provinsi Riau.
2) Pengawasan dan pembinaan terhadap mutu dan keamanan pangan segar belum optimal, terutama untuk kelompok buah dan sayur Provinsi Riau

masih rendah. Pengawasan dan pengujian diarahkan pada uji residu pestisida, masih sedikit yang memenuhi persyaratan keamanan pangan. Dengan penerapan GAP dan GHP yang baik oleh petani dan pelaku diharapkan dapat memenuhi standar persyaratan keamanan pangan segar yang ditetapkan.

3) Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah. Rendahnya akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana alam dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
4) Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan dimana luas baku lahan sawah provinsi Riau adalah 62.689 ha (sesuai SK Menteri ATR No. 686 tahun 2019), sementara itu yang dimanfaatkan untuk IP 200 baru lebih kurang 14.000 ha. Masih rendahnya penerapan mekanisasi ditingkat lapang juga menyebabkan rendahnya kemampuan untuk meningkatkan IP 100 menjadi IP 200. Selaindari pada itu berdasarkan Roadmap Riau Bertani yang telah disusun, pemanfaatan lahan dapat dimaksimalkan menjadi IP 200 dengan adanya dukungan prasarana (infrastruktur dan mekanisasi) yang baik dan memadai sesuai kebutuhan.
5) Rendahnya produktivitas sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dimana produktivitas padi berkisar 3,64 – 4,31 ton per hektar pada periode 2019-2022, sedangkan potensi produktivitas dapat dioptimalkan menjadi 7-12 ton per hektar. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman pangan. Dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman, harusdiimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan penerapan teknologi budidaya yang baik, Sumber daya manusia (SDM) Petani, serta pendampingan yang maksimal dari petugas lapang.

6) Pengawalan dan pembinaan terhadap panen dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura, terutama terhadap serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan bencana alam lainnya yang belum optimal. Upaya yang diperlukan dalam pengawalan adalah dengan pembinaan melalui peningkatan pengetahuan sumber daya petani serta melakukan gerakan pengendalian apabila terjadi serangan yang bersifat insidentil.

Tabel 1. 6 Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Lalu

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE SAKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	**Perencanaan Kinerja**	Dinas PTPH telah memperbaiki sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan dengan telah tersedianya dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar yang baik	Melakukan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala.	1. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember). 2. Laporan evaluasi kinerja disusun setiap semester dan dipresentasikan dalam rapat pimpinan. 3. Dibentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan bidang terkait. 4. Tim bertanggung jawab mengumpulkan data kinerja, menganalisis pencapaian, dan menyusun rekomendasi perbaikan. 5. Mengoptimalkan penggunaan SIAPADIA sebagai alat pemantauan real-time terhadap indikator kinerja. 6. Menghubungkan hasil evaluasi IKU dengan penganggaran berbasis kinerja untuk efektivitas program. 7. Membandingkan capaian IKU dengan target yang telah ditetapkan serta realisasi tahun sebelumnya. 8. Melakukan analisis gap untuk mengetahui faktor penghambat dan peluang perbaikan. 9. Hasil evaluasi IKU dipublikasikan dalam dashboard kinerja untuk memudahkan pemantauan oleh stakeholder. 10. Melibatkan Bappeda dan Inspektorat dalam evaluasi agar ada sinergi perbaikan kinerja.

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE SAKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
2	**Pengukuran Kinerja**	Dinas PTPH telah menginput aplikasi SIAPADIA sebagai salah satu alat yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja, namun kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta belum ada penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	Agar pada pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	1. Menetapkan parameter penilaian kinerja individu dan tim berbasis data dari SIAPADIA. 2. Menyusun kebijakan internal terkait pemberian insentif dan sanksi berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 3. Mengimplementasikan sistem penghargaan (reward) bagi pegawai atau unit kerja dengan pencapaian kinerja terbaik. 4. Melakukan review berkala atas hasil pengukuran kinerja untuk menyesuaikan strategi pencapaian target. 5. Menyusun rencana perbaikan kinerja bagi unit kerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 6. Mengembangkan program pelatihan atau capacity building untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. 7. Mengembangkan fitur dalam SIAPADIA untuk menampilkan dashboard kinerja yang lebih interaktif dan mudah dipantau. 8. Melatih pegawai dalam penggunaan SIAPADIA agar proses input dan analisis data lebih akurat. 9. Mengintegrasikan SIAPADIA dengan sistem evaluasi kepegawaian untuk meningkatkan akuntabilitas. 10. Mengadakan rapat evaluasi kinerja triwulanan untuk membahas capaian dan kendala. 11. Melibatkan Inspektorat dan Bappeda dalam evaluasi agar sistem reward dan punishment berjalan objektif. 12. Menyusun laporan evaluasi pengukuran kinerja sebagai dasar dalam perencanaan strategis tahun berikutnya.
3	**Pelaporan Kinerja**	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023. Laporan kinerja tersebut telah menggambarkan kinerja, memenuhi standar kualitas atas pencapaian kinerja, menyajikan informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Namun dokumen laporan kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kerja dengan realiasi kinerja	Menyajikan laporan kinerja yang memuat analisis capaian kinerja terhadap sasaran strategis PD, analisis perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta analisis realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.	1. Mengembangkan format pelaporan kinerja yang mencakup analisis pencapaian terhadap sasaran strategis DPTPH. 2. Memastikan bahwa setiap indikator kinerja utama (IKU) dikaitkan dengan target strategis organisasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi terhadap visi dan misi daerah. 3. Menyusun grafik tren kinerja yang menunjukkan pencapaian dari tahun ke tahun. 4. Menganalisis faktor penyebab peningkatan atau penurunan capaian kinerja dan menyusun rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya. 5. Mengumpulkan data kinerja dari provinsi lain atau standar nasional untuk membandingkan capaian kinerja.

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE SAKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).		6. Menyusun analisis gap (kesenjangan) antara realisasi kinerja daerah dengan standar nasional/internasional sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan. 7. Berkoordinasi dengan kementerian terkait atau lembaga riset untuk mendapatkan referensi benchmarking yang relevan. 8. Menyusun laporan dalam format yang lebih komprehensif dan berbasis data dengan dukungan visualisasi yang lebih informatif (grafik, tabel, infografis). 9. Mengintegrasikan sistem pelaporan kinerja dengan SIAPADIA untuk memastikan data yang digunakan akurat dan terkini. 10. Menyelenggarakan forum evaluasi kinerja yang melibatkan pemangku kepentingan untuk membahas hasil laporan sebelum finalisasi. 11. Menetapkan mekanisme review triwulanan terhadap laporan kinerja agar dapat dilakukan perbaikan sebelum laporan tahunan disusun. 12. Melakukan diseminasi hasil laporan kinerja kepada pemangku kepentingan agar transparansi dan akuntabilitas meningkat.
4	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau pada Evaluasi Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan pada seluruh bidang/sub unit dan evaluasi Akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.	1. Agar Evaluasi Kinerja Internal dilaksanakan pada seluruh bidang/sub unit; 2. Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara berkualitas oleh sumber daya dengan pendalaman yang memadai.	1. Menyusun pedoman evaluasi internal yang mencakup seluruh bidang dan sub-unit, sehingga tidak ada bagian yang terlewat. 2. Mengembangkan mekanisme evaluasi berkala (misalnya triwulanan atau semesteran) untuk memastikan implementasi akuntabilitas di semua unit kerja. 3. Memanfaatkan aplikasi SIAPADIA sebagai alat monitoring untuk mendukung transparansi dalam evaluasi. 4. Menyediakan bimbingan teknis (Bimtek) atau pelatihan khusus bagi tim evaluasi untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap metode evaluasi berbasis akuntabilitas. 5. Mengalokasikan sumber daya yang cukup, baik dari sisi SDM, anggaran, maupun sistem pendukung, agar evaluasi dapat berjalan secara optimal. 6. Menggunakan metode benchmarking untuk membandingkan hasil evaluasi internal dengan standar nasional agar dapat mengidentifikasi kesenjangan kinerja. 7. Mengembangkan format pelaporan hasil evaluasi yang lebih rinci dengan rekomendasi perbaikan yang jelas.

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE SAKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
				8. Melakukan analisis penyebab utama (root cause analysis) terhadap kendala yang ditemukan dalam evaluasi kinerja. 9. Mengadakan forum evaluasi dan umpan balik yang melibatkan pimpinan unit kerja untuk membahas hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikannya. 10. Mengaitkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan pemberian insentif atau sanksi, agar setiap unit terdorong untuk meningkatkan akuntabilitasnya. 11. Menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja untuk individu maupun unit kerja yang berkontribusi dalam pencapaian target akuntabilitas.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Dinas PTPH Riau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatnya Sistem Ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	64,12	65,87	67,62	69,37	71.12
			Skor PPH Ketersediaan (skor)	86,03	87,03	89,80	92,50	96,00
			Persentase Keamanan Pangan Segar	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			Persentase wilayah rentan pangan	28,40	26,62	25,44	23,07	21,30
2.	Meningkatkan pendapatan petani TPH	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortkultura (TPH)	NTUP Pangan	95,81	101,50	101,60	101,70	101,80
			NTUP Hortikultura	98,06	103,50	103,60	103,70	103,80
			Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	243.689	255.630	313.213	373.404	436.203
			Jumlah Produksi Jagung (Ton)	35.850	36.934	38.049	39.199	40.382
			Jumlah Produksi Buah Unggulan daerah (Durian) / (Ton)	-	17.154	19.257	21.477	23.814
			Jumlah Produksi Sayuran (Cabe) / (Ton)	-	17.796	19.236	20.775	22.419

Sumber: Perubahan Renstra 2019 - 2024 Dinas PTPH Provinsi Riau

2.1.1 Definisi Indikator

1. Indikator Satu : Indeks Ketahanan Pangan

   Indeks ketahanan pangan adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Empat komponen ketahanan pangan adalah ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas.

2. Indikator dua : Skor PPH Ketersediaan

   Skor PPH Ketersediaan adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan.

   Formulasi perhitungan jalan mantap adalah sebagai berikut :

   Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman ketersediaan kelompok pangan (% AKE x bobot masing-masing kelompok pangan)

3. Indikator Tiga : Persentase keamanan pangan segar

Pangan segar merupakan pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan. Keamanan Pangan Segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan Segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Formulasi perhitungan persentase keamanan pangan segar adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\sum jumlah\ pangan\ segar\ (buah\ dan\ sayur) yang\ bebas\ residu\ pestisida}{\sum jumlah\ sampel\ pangan\ segar\ yang\ diuji\ pestisida}\ x\ 100\%$$

4. Indikator Empat : Persentase wilayah rentan pangan

   Kerentanan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan daerah hingga perseorangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan minimum untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Keberhasilan indikator ini diukur dari penurunan wilayah rentan pangan yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$= \frac{\sum jumlah\ desa\ rawan\ pangan}{\sum jumlah\ desa\ se{-}Provinsi}\ x\ 100\%$$

5. Indikator Lima : NTUP Pangan

   Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) adalah rasio antara harga yang diterima petani dari hasil pertanian dengan harga yang dibayarkan petani untuk biaya produksi. NTUP Pangan adalah rasio antara harga yang diterima petani dari hasil pertanian dengan harga yang dibayarkan petani untuk biaya produksi tanaman pangan. Data ini merupakan data yang bersumber dari BPS Provinsi Riau.

6. Indikator Enam : NTUP Hortikultura

   Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) adalah rasio antara harga yang diterima petani dari hasil pertanian dengan harga yang dibayarkan petani untuk biaya produksi. NTUP Pangan adalah rasio antara harga yang diterima petani dari hasil pertanian dengan harga yang dibayarkan petani untuk biaya produksi hortikultura. Data ini merupakan data yang bersumber dari BPS Provinsi Riau

7. Indikator Tujuh : Jumlah Produksi Padi

   Indikator ini dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

   = Luas Panen x Produktivitas

   - Luas Panen adalah luas lahan yang ditanami tanaman padi dan berhasil dipanen.
   - Produktivitas adalah hasil panen rata-rata per unit luas lahan, biasanya dihitung dalam ton atau kilogram per hektar.

     (Data Statistik Pertanian (SP) Badan Pusat Statistik Provinsi Riau)

8. Indikator Delapan : Jumlah Produksi Jagung

   Indikator ini dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

   = Luas Panen x Produktivitas

   - Luas Panen adalah luas lahan yang ditanami tanaman jagung dan berhasil dipanen.
   - Produktivitas adalah hasil panen rata-rata per unit luas lahan, biasanya dihitung dalam ton atau kilogram per hektar. (Data Statistik Pertanian (SP) Badan Pusat Statistik Provinsi Riau)

9. Indikator Sembilan : Jumlah Produksi Buah-buahan (Durian)

   Indikator ini dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

   = Luas Panen x Produktivitas

   - Luas Panen adalah luas lahan yang ditanami tanaman buah-buahan dan berhasil dipanen.
   - Produktivitas adalah hasil panen rata-rata per unit luas lahan, biasanya dihitung dalam ton atau kilogram per hektar.

     (Data Statistik Pertanian (SP) Badan Pusat Statistik Provinsi Riau)

10. Indikator Sepuluh : Jumlah Produksi Sayuran (Cabe)

    Indikator ini dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

    = Luas Panen x Produktivitas

    - Luas Panen adalah luas lahan yang ditanami tanaman sayuran dan berhasil dipanen.
    - Produktivitas adalah hasil panen rata-rata per unit luas lahan, biasanya dihitung dalam ton atau kilogram per hektar.

(Data Statistik Pertanian (SP) Badan Pusat Statistik Provinsi Riau)

2.2. PERJANJIAN KINERJA Tahun 2024

Pada Tahun 2024 dilakukan perbaikan pohon kinerja sesuai arahan Menpan. Perbaikan tersebut menyebabkan terdapat tambahan indikator kinerja utama yang disperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70,12
2	Meningkatnya produksi TPH	Jumlah Produksi Padi (Ton)	436.203
		Jumlah Produksi Jagung (Ton)	40.382
		Jumlah Produksi Buah-buahan (Durian) (Ton)	23.814
		Jumlah Produksi Sayuran (Cabe) (Ton)	22.419
3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (skor)	72,95

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Jumlah sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya ada 3 (tiga), dengan uraian sebagai berikut :

3.1.1 Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Tahun 2024 dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan. Indikator Indeks Ketahanan Pangan diambil dari data yang diolah oleh Badan Pangan Nasional.

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Indeks Ketahanan Pangan

Sasaran	Indikator	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70,12	70,42	100,43

Perbandingan Capaian tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 2 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 dan 2024

Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70,12	70,42	100,43	68,62	68,68	100,09

Berdasarkan tabel di atas, capaian pada tahun 2023 dam 2024 keduanya di atas 100% atau melebihi target per tahunnya.

Untuk perbandingan dengan target tahun akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 3 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan dengan Target Tahun Akhir Renstra

Sasaran	Indikator	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi 2024
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70,12	70,42

Realisasi IKP Tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra.

Untuk capaian IKP Nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Capaian IKP Se-Indonesia

NO	PROVINSI	Kode Provinsi	IKP	Kelompok IKP	Kerentanan Area
1	BALI	51	88,23	6	Sangat Tahan
2	JAWA TENGAH	33	85,34	6	Sangat Tahan
3	DKI JAKARTA	31	85,13	6	Sangat Tahan
4	SUMATERA BARAT	13	84,32	6	Sangat Tahan
5	DI YOGYAKARTA	34	84,15	6	Sangat Tahan
6	JAWA TIMUR	35	83,86	6	Sangat Tahan
7	SULAWESI SELATAN	73	83,82	6	Sangat Tahan
8	JAWA BARAT	32	82,97	6	Sangat Tahan
9	KALIMANTAN SELATAN	63	82,95	6	Sangat Tahan
10	LAMPUNG	18	82,58	6	Sangat Tahan
11	GORONTALO	75	81,47	6	Sangat Tahan
12	BANTEN	36	79,25	6	Sangat Tahan
13	KALIMANTAN TIMUR	64	78,61	6	Sangat Tahan
14	NUSA TENGGARA BARAT	52	78,44	6	Sangat Tahan
15	SUMATERA UTARA	12	77,49	6	Sangat Tahan
16	SULAWESI TENGAH	72	76,87	6	Sangat Tahan
17	SULAWESI TENGGARA	74	76,68	6	Sangat Tahan
18	SULAWESI UTARA	71	76,32	6	Sangat Tahan
19	KALIMANTAN UTARA	65	75,77	6	Sangat Tahan
20	JAMBI	15	74,94	6	Sangat Tahan
21	SUMATERA SELATAN	16	74,07	5	Tahan
22	KALIMANTAN BARAT	61	73,49	5	Tahan
23	BENGKULU	17	73,39	5	Tahan
24	SULAWESI BARAT	76	71,99	5	Tahan
25	NUSA TENGGARA TIMUR	53	70,91	5	Tahan
26	RIAU	14	70,42	5	Tahan
27	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	19	70,21	5	Tahan
28	KALIMANTAN TENGAH	62	70,16	5	Tahan
29	KEPULAUAN RIAU	21	66,29	5	Tahan
30	MALUKU	81	62,68	4	Agak Tahan
31	MALUKU UTARA	82	61,44	4	Agak Tahan
32	PAPUA BARAT	91	51,36	3	Agak Rentan
33	PAPUA	94	40,21	2	Rentan

Sumber : Bapanas, 2024

Dari tabel di atas Riau menempati peringkat 26 dengan status kerentanan area Tahan. Sebanyak 20 Provinsi sudah memiliki status Sangat Tahan sementara Provinsi Riau masih memiliki status Tahan. Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Riau dihitung menggunakan rata-rata IKP 12 Kab/Kota se-Provinsi Riau.

Tabel 3. 5 IKP Per Kab/Kota

No	Kabupaten	2024	Kerentanan Area
	Provinsi Riau	**70,42**	
1	Kuantan Singingi	73,80	Tahan
2	Indragiri Hulu	60,71	Agak Tahan
3	Indragiri Hilir	69,30	Agak Tahan
4	Pelalawan	71,59	Tahan
5	Siak	77,06	Tahan
6	Kampar	59,69	Agak Rentan
7	Rokan Hulu	58,88	Agak Rentan
8	Bengkalis	65,75	Agak Tahan
9	Rokan Hilir	68,67	Agak Tahan
10	Kepulauan Meranti	71,15	Tahan
11	Pekanbaru	92,20	Sangat Tahan
12	Dumai	76,30	Tahan

Sumber : Bapanas, 2024

Tabel 3. 6 Nilai Indeks Kab/Kota di Provinsi Riau

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	2024			
		Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Provinsi Riau		**37,73**	**87,90**	**75,90**	**70,42**
1	Kuantan Singingi	**58,06**	**88,50**	**74,58**	**73,80**
2	Indragiri Hulu	**0,00**	**91,09**	**83,45**	**60,71**
3	Indragiri Hilir	**70,49**	**85,33**	**56,38**	**69,30**
4	Pelalawan	**35,71**	**87,16**	**86,83**	**71,59**
5	Siak	**44,98**	**92,46**	**89,58**	**77,06**
6	Kampar	**0,00**	**88,36**	**82,95**	**59,69**
7	Rokan Hulu	**0,00**	**84,35**	**83,93**	**58,88**
8	Bengkalis	**28,49**	**88,45**	**76,66**	**65,75**
9	Rokan Hilir	**39,61**	**89,00**	**75,21**	**68,67**
10	Kepulauan Meranti	**100,00**	**69,62**	**50,66**	**71,15**
11	Pekanbaru		**97,20**	**88,11**	**92,20**
12	Dumai		**93,25**	**62,44**	**76,30**

Sumber : FSVA Bapanas, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat masih terdapat Kabupaten yang memiliki IKP di bawah angka 60 dengan status agak rentan yaitu Kampar dan Rokan Hulu. Terdapat juga Kabupaten yang memiliki IKP di bawah

angka 70 dengan status agak tahan yaitu Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis dan Rokan Hilir.

Berdasarkan data IKP 2024 untuk Provinsi Riau, intervensi strategis yang dapat dilakukan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau untuk meningkatkan capaian target dan kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat difokuskan pada 3 dimensi IKP: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan, dengan pendekatan berbasis wilayah.

1. Intervensi Dimensi Ketersediaan Pangan (Indeks Ketersediaan – IK)
   a. Peningkatan Produksi Pangan Lokal
      - Melaksanakan intensifikasi lahan pertanian melalui penyediaan benih unggul, pemupukan berimbang, rehabilitasi irigasi tersier, dan penyuluhan terpadu.
      - Mengoptimalkan lahan tidur dan lahan marginal melalui program perluasan areal tanam yang berwawasan lingkungan.
      - Mendorong penerapan konsep "*One Village One Commodity*" (OVOC) berbasis pangan strategis daerah.
      - Memberikan insentif bagi petani milenial untuk mengembangkan agribisnis pangan lokal.
   b. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
      - Mendirikan dan mengelola gudang pangan daerah yang dikelola gapoktan, BUMDes, atau koperasi.
      - Menjalin kemitraan dengan Bulog dan stakeholder logistik lainnya untuk memastikan ketersediaan stok pangan strategis.
      - Melakukan audit dan rotasi cadangan pangan secara berkala untuk menjamin kualitas dan kuantitasnya.
   c. Peningkatan Distribusi dan Sarana Produksi
      - Pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani serta jalur distribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen.
      - Pengadaan dan modernisasi rumah penggilingan padi, pengering hasil panen, serta cold storage untuk hortikultura.
      - Penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) bagi kelompok tani dalam bentuk bantuan atau sewa murah.
2. Intervensi Dimensi Keterjangkauan Pangan (Indeks Akses – IA)

a. Stabilisasi Harga Pangan
   - Melaksanakan operasi pasar murah secara berkala, terutama menjelang hari besar keagamaan dan saat gejolak harga.
   - Mendorong kerjasama antar daerah (KAD) dengan provinsi penghasil pangan untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga.

b. Penguatan Pasar Alternatif Pangan
   - Mengembangkan pasar tani dan festival pangan lokal sebagai media distribusi langsung dari petani ke konsumen.
   - Mendorong digitalisasi perdagangan pangan melalui e-commerce desa atau aplikasi jual beli lokal berbasis pangan sehat dan lokal.

c. Optimalisasi Transportasi dan Logistik Pangan
   - Memberikan subsidi ongkos angkut pangan ke wilayah 3T dan daerah yang rawan keterjangkauan.
   - Menyusun rute distribusi pangan efisien melalui pemetaan titik produksi dan konsumsi.

d. Perlindungan Konsumen Rentan
   - Menyediakan kartu subsidi pangan lokal untuk rumah tangga rawan pangan, difokuskan pada pangan bergizi dan berbasis lokal.
   - Menyelenggarakan program "Akses Pangan Keluarga" yang menyasar keluarga miskin dan rawan gizi melalui sistem kupon pangan atau transfer langsung.

3. Intervensi Dimensi Pemanfaatan Pangan (Indeks Pemanfaatan – IP)

a. Pendidikan Gizi dan Konsumsi Pangan B2SA
   - Melaksanakan edukasi dan kampanye gizi seimbang melalui media sosial, sekolah, dan posyandu.
   - Mengadakan pelatihan bagi keluarga dan UMKM untuk mengolah pangan lokal yang bergizi, aman, dan berbasis B2SA.

b. Peningkatan Keamanan Pangan Rumah Tangga
   - Memberikan pelatihan sanitasi pangan dan kebersihan rumah tangga bagi ibu rumah tangga dan pelaku UMKM.
   - Mendorong pelaku usaha rumah tangga untuk mendapatkan sertifikasi PIRT dan pembinaan lanjutan.

c. Penguatan Sarana Sanitasi dan Air Bersih
   - Bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR untuk membangun fasilitas air bersih dan sanitasi di daerah yang masih mengalami kerawanan pangan.
   - Memastikan bahwa program pangan juga mempertimbangkan indikator kesehatan lingkungan untuk mendukung pemanfaatan pangan secara optimal.

4. Intervensi Penunjang Peningkatan Kinerja dalam LKjIP
   a. Perencanaan Berbasis IKP
      - Menyusun target tahunan IKP dan setiap dimensinya dalam dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja (PK).
      - Mengembangkan peta jalan (roadmap) pencapaian IKP Provinsi Riau tahun 2025–2029 yang selaras dengan RPJMD dan RPJPD.
   b. Monitoring dan Evaluasi Capaian IKP
      - Melakukan monev program dan indikator IKP setiap triwulan menggunakan dashboard digital.
      - Menyusun laporan kinerja tematik berdasarkan kontribusi kegiatan terhadap peningkatan IK, IA, dan IP secara spesifik.
   c. Integrasi dan Sinkronisasi Program
      - Mengintegrasikan kebijakan ketahanan pangan dengan program dari OPD lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, TPID, dan Disperindagkop-UKM.
      - Membangun forum koordinasi ketahanan pangan daerah secara berkala untuk menyinergikan pelaksanaan program dan anggaran.

Penjabaran hambatan dan kendala dalam pencapaian target dan kinerja IKP sebagai berikut :

❖ Hambatan pada Dimensi Ketersediaan (IK)
   a) Keterbatasan lahan produktif akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian (perkebunan, pemukiman, industri).
   b) Kurangnya irigasi teknis yang memadai, menyebabkan ketergantungan pada musim hujan untuk produksi pangan.

c) Rendahnya pemanfaatan teknologi pertanian modern oleh petani, terutama di daerah pedesaan.
d) Minimnya pendampingan dan penyuluhan pertanian yang berkelanjutan serta kurangnya SDM penyuluh di lapangan.
e) Terbatasnya ketersediaan benih unggul dan pupuk bersubsidi.

❖ Hambatan pada Dimensi Keterjangkauan (IA)

a) Tingginya biaya distribusi pangan ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) akibat infrastruktur jalan/logistik yang belum optimal.
b) Fluktuasi harga pangan strategis yang tinggi, dipengaruhi oleh cuaca ekstrem dan keterbatasan pasokan.
c) Lemahnya integrasi pasar lokal, yang membuat harga di tingkat petani dan konsumen tidak terkoneksi dengan baik.
d) Keterbatasan intervensi anggaran untuk operasi pasar murah dan distribusi pangan bersubsidi.

❖ Hambatan pada Dimensi Pemanfaatan (IP)

a) Rendahnya literasi gizi masyarakat, terutama dalam pemilihan dan pengolahan pangan yang aman dan bergizi.
b) Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses air bersih dan sanitasi layak, berdampak pada keamanan pangan.
c) Kurangnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan pangan rumah tangga yang higienis, menyebabkan pemborosan pangan dan keracunan makanan.
d) Belum optimalnya program edukasi B2SA di sekolah, posyandu, dan komunitas ibu rumah tangga.

Penyebab Keberhasilan :

- Nilai aspek keterjangkauan pangan dan aspek pemanfaatan pangan mengalami kenaikan
- Ketersediaan bahan pokok pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan wilayah Provinsi Riau, dapat diperoleh dari beberapa faktor yakni stok atau cadangan pangan, produksi dalam Provinsi Riau dan produksi dari luar provinsi. Untuk pemenuhan yang berasal dari dalam provinsi, produksi beras baru memenuhi kebutuhan

sebesar 27,4% dari kebutuhan penduduk Provinsi Riau, sedangkan untuk kekurangannya diperoleh dari luar provinsi (Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Selatan

- Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan adalah produksi, stok atau cadangan pangan, impor dan ekspor bahan pangan. Masih terdapat 13 kecamatan yang termasuk kategori wilayah rentan pangan yang harus di perhatikan lebih lanjut dalam penanganannya
- Tingkat kesadaran petani dan pelaku usaha dalam menerapkan GAP (Good Agricultural Practices) dan GHP (Good Handling Practices) semakin meningkat.

Upaya-upaya yang dilakukan :

- Peningkatan Ketersediaan Pangan melalui :
  1) Modernisasi Sarana Dan Prasarana Pertanian
  2) Penyediaan alat dan mesin pertanian berupa alsintan pra panen dan pasca panen dan Pengembangan sumber-sumber air, baik air permukaan maupun air tanah (dangkal/ dalam) serta pengembangan sistem jaringan irigasi yang terintegrasi kewenangan PU dan Pertanian dalam upaya pembenahan dan perluasan sistem produksi sehingga dapat menjamin kebutuhan air untuk pertanaman dan Perluasan Areal Tanam (PAT) pada sawah irigasi, tadah hujan dan rawa.
  3) Peningkatan SDM Dan Kelembagaan Pertanian Unggul
  4) Peningkatan kapasitas SDM, regenerasi petani, transformasi kelembagaan berbasis korporasi petani dan digitalisasi pertanian dalam upaya penguatan sistem produksi dan penguatan daya saing, hilirisasi dengan pemantapan pasar dan penguasaan pasar
  5) Pertanian Berkelanjutan
  6) Percepatan penetapan LP2B dan pencadangan lahan, penerapan standar instrumen pertanian pada proses budidaya dan produk hasil pertanian serta penerapan inovasi teknologi pertanian dan ramah lingkungan.
  7) Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP)

8) Peningkatan IP dari rata-rata IP-129 menjadi IP-200 pada lahan sawah yang sumber airnya cukup untuk pertanaman IP melalui pengaturan pola tanam, penggunaan varietas padi genjah dan untuk lahan sawah yang kering dengan varietas tahan kekeringan/ padi gogo.
9) Peningkatan Produktivitas (PP)
10) Peningkatan produktivitas dari capaian tertinggi 4,18 ton/ha menyusul rata-rata nasional 5,29 ton/ha dengan penggunaan benih unggul spesifik lokasi dan penggunaan pupuk berimbang yang ramah lingkungan melalui bantuan benih dan pupuk serta penerapan teknologi budidaya

- Peningkatan Keterjangkauan Pangan melalui :
  1) Pengendalian harga dan distribusi harga melalui kolaborasi dengan TPID untuk menggelar operasi pasar dan pasar murah saat momen rawan harga.
  2) Penguatan Distribusi pangan (optimalisasi gudang penyimpanan di wilayah strategis untuk mencegah kekosongan stok),
  3) Stabilitas Pasokan dan Harga (Intervensi pasar melalui operasi pasar murah), Peningkatan Sistem Logistik,
  4) Manajemen stok yang efisien,
  5) Peningkatan Daya Beli Masyarakat, Akses Pasar (Pengembangan pasar lokal)
  6) Peningkatan Informasi harga pangan berbasis aplikasi dan Tata Niaga Pangan Contract Farming (kerja sama antara petani dan pelaku usaha) dan BUMD Pangan (stabilisator harga dan pasokan pangan di daerah).
- Peningkatan Pemanfaatan Pangan melalui :
  1) Kampanye Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)
     - Edukasi konsumsi pangan B2SA melalui sekolah, posyandu, dan media sosial.
     - Pengenalan menu B2SA lokal melalui lomba cipta menu dan gerakan makan sehat.
  2) Keamanan dan Higienitas Pangan
     - Sosialisasi keamanan pangan rumah tangga dan penyuluhan sanitasi pangan.

- Pembinaan terhadap pengelola pangan skala rumah tangga dan UMKM agar memenuhi standar keamanan pangan.

3) Penguatan Gizi Masyarakat Rentan
   - Intervensi gizi spesifik untuk ibu hamil, balita, dan lansia melalui sinergi dengan Dinas Kesehatan.
   - Program diversifikasi pangan lokal berbasis sumber karbohidrat non-beras (umbi, sagu, jagung).

Solusi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam memenuhi ketersediaan pangan pokok adalah dengan :

1) Meningkatkan penyediaan dalam daerah melalui peningkatan produksi padi, mendorong masyarakat melakukan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras serta melakukan kerjasama dengan Provinsi tetangga penghasil beras.
2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengatasi perbaikan infrastruktur agar penditribusian dapat berjalan dengan baik.
3) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha serta mensosialisasikan pentingnya penerapan GAP dan GHP untuk kesehatan masyarakat
4) Pengendalian alih fungsi lahan: Melalui regulasi yang lebih ketat dan insentif untuk mempertahankan lahan produktif.
5) Pengembangan teknologi adaptif: Seperti varietas unggul tahan iklim dan sistem pertanian berbasis digital.
6) Penguatan akses pasar: Melalui promosi produk lokal dan kemitraan dengan sektor ritel modern.
7) Subsidi input pertanian: Menurunkan biaya produksi dengan subsidi pupuk dan alat mesin pertanian.
8) Kolaborasi lintas sektor: Melibatkan perguruan tinggi dan institusi riset untuk inovasi teknologi pertanian.

Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya terhadap pencapaian kinerja meningkatnya sistem ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	%PENYERAPAN ANGGARAN	%TINGKAT EFISIENSI
1	MeningkatnyaSistem Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70,42	30,81	69,19

Dari Tabel 3.7 di atas dapat terlihat bahwa tingkat efisiensi cukup besar yaitu 69,19%. Adapun analisis efisiensi penyerapan anggaran adalah terdapat permasalahan keuangan daerah yang menyebabkan beberapa sub kegiatan mengalami tunda bayar sehingga tidak dapat terealisasi pada tahun 2024.

Program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya sistem ketahanan pangan adalah :

Tabel 3. 8 Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya sistem ketahanan pangan

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	70,12	70,42	100,43	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	778.261.191,00	397.730.721,00	51,11
						Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi	623.292.084,00	297.203.765,00	47,68

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
						Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	468.269.665,00	186.266.765,00	39,78
						Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	155.022.419,00	110.937.000,00	71,56
						Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	154.969.107,00	100.526.956,00	64,87
						Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	129.969.317,00	79.969.317,00	61,53
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	24.999.790,00	20.557.639,00	82,23
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	645.549.655,00	40.884.000,00	6,33

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	64.999.655,00	38.834.000,00	59,74
						Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	64.999.655,00	38.834.000,00	59,74
						Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	580.550.000,00	2.050.000,00	0,35
						Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	580.550.000,00	2.050.000,00	0,35

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Peningkatan sistem ketahanan pangan adalah 2 Program. Dari 2 Program tersebut terdapat 1 Program yang serapan anggarannya termasuk rendah yakni Program Penanganan Kerawanan Pangan yakni 6,33%. Namun tidak mengurangi kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis karena capaiannya fisik 100%.

3.1.2 Sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura Tahun 2024 terdiri dari 4 Indikator, sesuai tabel berikut :

Tabel 3. 9 Capaian Indikator Produksi Tanaman Pangan Hortikultura

Sasaran	Indikator	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura	Jumlah Produksi Padi (Ton)	436.203	225.837	51,77
	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	40.382	9.369,14	23,20
	Jumlah Produksi Buah-Buahan (Durian) (Ton)	23.814	25.663,16	107,76
	Jumlah Produksi Sayuran (Cabe)((Ton)	22.419	15.332,35	68,38

Perbandingan Capaian tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 10 Perbandingan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura Tahun 2023 dan 2024

Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura	Jumlah Produksi Padi (Ton)	436.203	225.837	51,77	373.404	210.373,61	56,34
	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	40.382	9.369,14	23,20	39.199	9.975	24,45
	Jumlah Produksi Buah-Buahan (Durian) (Ton)	23.814	25.663,16	107,76	21.477	27.289	127,06
	Jumlah Produksi Sayuran (Cabe)((Ton)	22.419	15.332,35	68,38	20.775	19.207	92,45

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

1. produksi padi mengalami penurunan sebesar 4,57%.
2. Produksi jagung mengalami penurunan sebesar 1,25%
3. Produksi Durian mengalami penurunan sebesar19,3%
4. Produksi Cabe mengalami penurunan sebesar 24,07%

Untuk perbandingan dengan target tahun akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 11 Perbandingan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura Tahun 2024 dan Target Tahun Akhir Renstra

Sasaran	Indikator	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi 2024
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura	Jumlah Produksi Padi (Ton)	436.203	225.837
	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	40.382	9.369,14
	Jumlah Produksi Buah-Buahan (Durian) (Ton)	23.814	25.663,16
	Jumlah Produksi Sayuran (Cabe)((Ton)	22.419	15.332,35

Realisasi Produksi Tanaman Pangan Hortikultura Tahun 2024 rata-rata tidak mencapai target kecuali produksi durian.

Penyebab kegagalan dan keberhasilan pencapaian target dan peningkatan capaian kinerja ini dapat tercapai karena hal-hal berikut :

1. Kinerja Produksi Padi

    - Terbatasnya infrastruktur dalam mendukung peningkatan intensitas pemanfaatan lahan seperti jaringan irigasi yang tidak fungsional, tanggul yang tidak berfungsi dan lainnya yang juga merupakan faktor penghambat dalam pencapaian target luas tanam/panen.
    - Alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra tanam dan pasca panen yang belum memadai untuk melakukan percepatan tanam serta untuk meminimalisir kehilangan hasil.
    - Rendahnya capaian produksi juga disebabkan pada tahun 2024 terjadi puso akibat anomali iklim,
    - Selain dari pada itu, rendahnya produksi juga disebabkan karena ada 4.066,8 ha padi ladang yang tidak terakomodir dalam perhitungan luas panen dengan metode KSA.
    - Pola pertanian yang subsisten yang orientasinya masih untuk memenuhi kebutuhan keluarga

2. Kinerja Produksi Jagung

    Komoditi jagung bukanlah komoditi utama di Provinsi Riau dan komoditi ini belum mempunyai lahan baku. Penanamannya sering dilakukan disela-sela tanaman lainnya. Dalam pengembangan komoditi jagung, petani masih berorientasi pada program, dimana sangat tergantung pada ada tidaknya bantuan dari Pemerintah.

3. Kinerja Produksi Durian

    Komoditi durian termasuk komoditi unggulan daerah untuk Provinsi Riau. Animo petani untuk mengembangkan tanaman durian cukup besar.

4. Kinerja Produksi Cabe

    Capaian produksi yang cukup tinggi ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya produktivitas tanaman cabe. Dengan penerapan teknologi budidaya tanaman cabe serta penggunaan sarana produksi (bibit/benih bermutu, pupuk yang sesuai kebutuhan dan lain lainnya) dapat memicu

peningkatan produktivitas. Komoditi tanaman cabe juga termasuk tanaman yg cukup diminati oleh petani, karena harga yang cukup bersaing di pasaran

Upaya dan Solusi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan tanaman pangan hortikultura adalah :

1. Peningkatan produksi padi
   - Menyediakan/memfasilitasi kebutuhan infrastruktur dan sarana produksi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan melalui program pemerintah.
   - Melakukan pengawalan terhadap luas panen guna meminimalisir kehilangan hasil akibat serangan OPT dan bencana alam lainnya.
   - Menguatkan kelembagaan penyuluh dan petani dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, agar mau dan mampu meningkatkan produksi padi melalui peningkatan IP dan produktivitas.

2. Peningkatan produksi jagung
   - Menyediakan/memfasilitasi kebutuhan infrastruktur dan sarana produksi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan melalui program pemerintah.
   - Menguatkan kelembagaan penyuluh dan petani dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, agar mau dan mampu meningkatkan produksi padi melalui peningkatan IP dan produktivitas.

3. Peningkatan produksi durian

   Diperlukan adanya kegiatan yang mendukung pengembangan komoditi durian dalam rangka peremajaan tanaman tua dan rusak.

4. Peningkatan produksi cabe

   Perlu adanya bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) yang mendukung pengembangan komoditi untuk percepatan tanam serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani terhadap penggunaan teknologi budidaya tanaman cabe.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan dan SDM) terhadap pencapaian kinerja sasaran dan indikator. Dalam melakukan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya, pengukurannya dilakukan dengan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumberdaya yang digunakan, dalam hal ini adalah dana atau anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	%PENYERAPAN ANGGARAN	%TINGKAT EFISIENSI
2	Meningkatnya produksi TPH	Jumlah Produksi (TonGKG)	51,77	78,67	21,33
		Jumlah Produksi Jagung(Ton PK)	23,20		
		Jumlah Produksi Buah- buahan (Durian)(Ton)	107,76		
		Jumlah Produksi Sayuran(Cabe)(Ton)	68,38		

Dari Tabel 3.12 terlihat bahwa efisiensi anggaran adalah sebesar 21,33%. Tingkat efisiensi ini tidak terlalu besar namun tetap dipengaruhi oleh permasalahan keuangan daerah yang menyebabkan beberapa sub kegiatan mengalami tunda bayar sehingga realisasi anggaran tidak dapat terealisasi seluruhnya.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
2	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura	Jumlah Produksi Padi (Ton)	436.203,00	225.837,00	51,77	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	43.450.918.036,00	34.381.911.774,90	79,13
		Jumlah Produksi Jagung (Ton)	40.382,00	9.369,14	23,20	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	34.341.333.031,00	27.759.281.878,90	80,83
		Jumlah Produksi Buah-Buahan (Durian) (Ton)	23.814,00	25.663,16	107,76	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	34.341.333.031,00	27.759.281.878,90	80,83

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
		Jumlah Produksi Sayuran (Cabe)((Ton)	22.419,00	15.332,35	68,38	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	9.109.585.005,00	6.622.629.896,00	72,70
						Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	9.109.585.005,00	6.622.629.896,00	72,70
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.107.205.140,00	5.421.365.404,77	66,87
						Penataan Prasarana Pertanian	8.107.205.140,00	5.421.365.404,77	66,87
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2.932.031.805,00	1.357.356.535,43	46,29

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	5.175.173.335,00	4.064.008.869,34	78,53
						Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	-	-	-
						UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	512.573.222,00	430.611.162,00	84,01
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	389.978.734,00	320.148.819,00	82,09
						Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas	389.978.734,00	320.148.819,00	82,09

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						Daerah Kabupaten/Kota			
						Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	314.979.406,00	253.346.311,00	80,43
						Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	74.999.328,00	66.802.508,00	89,07
						UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	2.040.454.938,00	1.653.752.966,00	81,05
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.611.992.141,00	1.255.493.750,00	77,88
						Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	461.997.212,00	317.583.750,00	68,74
						Penyediaan dan PeningkatanKapasitas Penyuluh pertanian	461.997.212,00	317.583.750,00	68,74

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	999.999.929,00	828.446.300,00	82,84
						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	999.999.929,00	828.446.300,00	82,84
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	149.995.000,00	109.463.700,00	72,98
						Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	149.995.000,00	109.463.700,00	72,98
						UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	7.242.655.110,00	6.603.853.752,00	91,18
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	1.199.979.887,00	933.614.850,00	77,80

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						SARANA PERTANIAN			
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.159.979.947,00	902.339.850,00	77,79
						Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	232.441.966,00	226.777.000,00	97,56
						Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	927.537.981,00	675.562.850,00	72,83
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	39.999.940,00	31.275.000,00	78,19
						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG	39.999.940,00	31.275.000,00	78,19

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						Tumbuhan dan Mikroorganisme			
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.410.952.000,00	4.113.494.253,00	93,26
						Penataan Prasarana Pertanian	4.410.952.000,00	4.113.494.253,00	93,26
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	4.410.952.000,00	4.113.494.253,00	93,26
						UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.361.336.688,00	1.286.795.928,00	94,52

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	927.851.569,00	856.411.986,00	92,30
						Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	927.851.569,00	856.411.986,00	92,30
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	927.851.569,00	856.411.986,00	92,30

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dapat terlaksana dengan baik, dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis. Terdapat 6 Program yang mendukung sasaran ini dan realisasinya rata-rata berpredikat baik.

3.1.3 Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

Capaian kinerja pada Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel memiliki 1(satu) indikator dengan capaian kinerja sesuai tabel berikut :

Tabel 3. 14 Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Sasaran	Indikator	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Poin)		72,15	

Perbandingan Capaian tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 15 Perbandingan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura Tahun 2023 dan 2024

Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Poin)		72,15			71,95	

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan capaian kinerja tahun 2024 meningkat sebesar 0,2 poin. Rincian uraian peningkatan bobot dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 16 Rincian uraian peningkatan bobot

No	Uraian	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80	30	25,50
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,90	30	16,80
3.	Pelaporan KInerja	15	12,00	15	12,60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,25	25	17,25
	Nilai Hasil Evaluasi		**71,95**		**72,15**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**		**BB**

Pada uraian perencanaan kinerja mengalami peningkatan 2,7 poin. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan sistem manajemen kinerja dan dimanfaatkannya dokumen perencanaan kinerja untukmewujudkan hasil yang berkesinambungan. Pada uraian pengukuran kinerja mengalami penurunan 2,10 poin,hal ini disebabkan kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* serta belum ada penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Pada uraian pelaporan kinerja, mengalami peningkatan 0,60 poin. Hal ini didukung oleh kelengkapan laporan kinerja. Pada uraian evaluasi akuntabilitas kinerja internal mengalami penurunan 1,00 poin, hal ini disebabkan oleh belum dilakukannya evaluasi internal di seluruh Bidang/Sub Unit pada Dinas. Peningkatan signifikan pada uraian perencanaan kinerja membantu nilai akuntabilitas Dinas PTPH mengalami peningkatan.

Tabel 3. 17 Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2023 dengan Target Tahun Akhir Renstra

Sasaran	Indikator	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi 2024
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Poin)	72,95	72,15

Perbandingan capaian Nilai akuntabilitas kinerja OPD (poin) pada Tahun 2023 dengan target tahun akhir renstra masih butuh 0,8 poin.

Penyebab kegagalan dan keberhasilan pencapaian target dan peningkatan capaian kinerja ini dapat tercapai karena hal-hal berikut :

1. Perencanaan Kinerja

   Telah diperbaikinya sistem manajemen kinerja dan dimanfaatkannya dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

2. Pengukuran kinerja

   Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* serta belum ada penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3. Pelaporan Kinerja

   Dokumen laporan kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional/internasional.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

   Evaluasi kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan pada seluruh bidang/sub unit dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

Upaya dan Solusi yang dilaksanakan dalam meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja adalah :

1. Perencanaan Kinerja

   Melakukan monitoring dan evaluasi indikator kinerja utama (IKU) secara berkala.

2. Pengukuran Kinerja

   Hasil pengukuran kinerja menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
3. Pelaporan Kinerja

Menyajikan laporan kinerja yang memuat analisis capaian kinerja terhadap sasaran strategis, analisis perbandingan realisasikinerja dengan realisasi kinerja tahun –tahun sebelumnya serta analisis kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   Melaksanakan evaluasi kinerja internal pada seluruh bidang/sub unit.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan dan SDM) terhadap pencapaian kinerja sasaran dan indikator. Dalam melakukan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya, pengukurannya dilakukan dengan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumberdaya yang digunakan, dalam hal ini adalah dana atau anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	%PENYERAPAN ANGGARAN	%TINGKAT EFISIENSI
3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Poin)	98,90		

Dari Tabel 3.18 terlihat bahwa efisiensi anggaran adalah sebesar 21,33%. Tingkat efisiensi ini tidak terlalu besar namun tetap dipengaruhi oleh permasalahan keuangan daerah yang menyebabkan beberapa sub kegiatan mengalami tunda bayar sehingga realisasi anggaran tidak dapat terealisasi seluruhnya.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 19 Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
2	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura	Jumlah Produksi Padi (Ton)	72.95	72.15	98.90	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	57.555.221.111	54.317.370.894,06	94,37
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.999.808	70.837.098	74.57

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dapat terlaksana dengan baik, dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis. Terdapat 1 Program yang mendukung sasaran ini dan realisasinya cukup baik.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3. 20 Realisasi Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya ketahanan pangan					121.694.175.091,00				
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	95,00	Poin	778.261.191,00	88,14	397.730.721,00	92,78	51,11
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2	Laporan	623.292.084,00	2	297.203.765,00	100,00	47,68

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah Provinsi	Informasi Harga Pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah Provinsi	1	Laporan	155.022.419,00	1	110.937.000,00	100,00	71,56
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	Laporan	468.269.665,00	1	186.266.765,00	100,00	39,78
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	**Jumlah Dokumen Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun**	**6**	**Dokumen**	**154.969.107,00**	**6**	**100.526.956,00**	100,00	64,87
		Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5	Dokumen	129.969.317,00	5	79.969.317,00	100,00	61,53
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan	1	Laporan	24.999.790,00	1	20.557.639,00	100,00	82,23

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		Konsumsi per Kapita per Tahun	Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun							
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	**Penurunan Wilayah Rawan Pangan**	**36**	**Kec**	**645.549.655,00**	**9**	**40.884.000,00**	**25,00**	
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	**Laporan FSVA (Food Security Vulnerabilty Atlas)**	**1**	**Laporan**	**64.999.655,00**	**1,00**	**38.834.000,00**	**100,00**	**59,74**
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	64.999.655,00	1	38.834.000,00	100,00	59,74
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	**Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah**	**44,50**	**Ton**	**580.550.000,00**	**44,50**	**2.050.000,00**	**100,00**	**0,35**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	Dokumen	580.550.000,00	1	2.050.000,00	100,00	0,35
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	**Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar**	**85**	**Persen**	**389.978.734,00**	**93,00**	**320.148.819,00**	**109,41**	**82,09**
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Diterbitkan**	**61**	**Dokumen**	**389.978.734,00**	**118**	**320.148.819,00**	**193,44**	**82,09**
		Sertifikasi Keamanan dan mutu pangan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	50	Sertifikat	314.979.406,00	93	253.346.311,00	186,00	80,43

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		segar asal tumbuhan								
		Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	5	Dokumen	74.999.328,00	6	66.802.508,00	120,00	89,07
2	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura									
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**	**100**	**Persen**	**60.171.486.738,00**	**100**	**56.813.221.044**	**100,00**	**94,42**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**5**	**Dokumen**	**94.999.808,00**	5	**70.837.098,00**	100,00	74,57

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
			Perangkat Daerah							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	5	Dokumen	94.999.808,00	5	70.837.098,00	100,00	74,57
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dipenuhi**	**5**	**Laporan**	**49.518.493.479,00**	**5**	**47.062.192.081,94**	**100,00**	**95,04**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	330	Orang/Bulan	49.518.493.479	330	47.062.192.081,94	100,00	95,04
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dikelola**	**7**	**Laporan**	**95.147.895,00**	**7**	**89.836.250,00**	**100,00**	**94,42**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	7	Laporan	95.147.895,00	7	89.836.250,00	100,00	94,42

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
			Daerah pada SKPD							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**1.580.498.185,00**	**100**	**1.382.175.109,00**	**100,00**	**87,45**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	29.992.717,00	2	29.431.000,00	200,00	98,13
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PMKP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	18.132.864,00	1	18.132.200,00	100,00	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PPP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000,00	1	10.000.000,00	100,00	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PSBTPH)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.325.000,00	1	11.325.000,00	100,00	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PTPH)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.998.835,00	1	4.998.000,00	100,00	99,98
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	143.250.262,00	2	142.139.125,00	200,00	99,22
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PMKP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	19.462.485,00	1	19.230.225,00	100,00	98,81
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PPP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.223.145,00	1	10.202.400,00	100,00	99,80

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PSBTPH)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	36.389.291,00	1	35.989.000,00	100,00	98,90
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PTPH)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	24.998.315,00	2	24.188.000,00	200,00	96,76
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	235.282.000,00	2	229.081.000,00	200,00	97,36
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PTPH)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000,00	1	9.840.000,00	100,00	98,40
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	59.994.394,00	2	57.158.600,00	200,00	95,27
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT PMKP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	16.600.535,00	1	16.394.130,00	100,00	98,76
		Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1	Paket	9.999.983,00	1	7.724.150,00	100,00	77,24

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		Penggandaan (UPT PPP)	Penggandaan yang Disediakan							
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT PSBTPH)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	14.998.359,00	1	14.859.000,00	100,00	99,07
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	924.850.000,00	1	741.483.279,00	100,00	80,17
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan**	**1**	**Unit**	**221.863.200,00**	**-**	**219.627.200,00**	**-**	**98,99**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	221.863.200,00	-	219.627.200,00	-	98,99
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**10**	**Laporan**	**6.976.219.671,00**	**4**	**6.560.387.314,00**	**40,00**	**94,04**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemerintahan Daerah	**Pemerintah Daerah**							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	15.000.000,00	-	10.270.000,00	-	68,47
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1.344.535.680,00	1	1.150.484.519,00	100,00	85,57
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	25.000.000,00	1	15.000.000,00	-	60,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PSBTPH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	34.996.243,00	1	34.780.000,00	100,00	99,38
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PTPH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	17.500.000,00	2	17.500.000,00	200,00	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	3.408.797.176,00	1	3.294.141.760,00	100,00	96,64
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PMKP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	3.998.604,00	1	3.857.180,00	100,00	96,46
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PPP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	342.259.669,00	1	315.536.064,00	100,00	92,19
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PSBTPH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.444.204.330,00	1	1.378.898.495,00	100,00	95,48
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PTPH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	339.927.969,00	1	339.919.296,00	100,00	100,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**284**	**Unit**	**1.684.264.500,00**	**284**	**1.428.165.991,12**	**100,00**	**84,79**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemerintahan Daerah	**Daerah yang Dipelihara**							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	256.990.000,00	8	256.986.654,00	100,00	100,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90	Unit	197.540.000,00	90	197.511.012,00	100,00	99,99
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	2	Unit	54.560.000,00	2	43.058.608,00	100,00	78,92

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		Operasional atau Lapangan (UPT PMKP)	Pajak dan Perizinannya							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT PPP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	36.060.000,00	1	34.876.602,00	100,00	96,72
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT PSBTPH)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	89.810.000,00	1	80.893.154,00	14,29	90,07
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	36.060.000,00	1	33.938.646,00	16,67	94,12

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		Lapangan (UPT PTPH)								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliahara	125	Unit	74.922.000,00	125	73.168.500,00	100,00	97,66
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PMKP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	9.840.000,00	15	9.790.000,00	100,00	99,49
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PPP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38	Unit	19.920.000,00	38	19.920.000,00	100,00	100,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	908.562.500,00	6	678.022.815,12	100,00	74,63
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	**Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman**	**2,64**	**Persen**	**44.650.897.923,00**	**1,02**	**35.284.251.625**	**38,64**	**79,02**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
			Pangan dan Hortikultura							
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	**Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian**	**9170**	**Ha**	**34.341.333.031,00**	**9.170**	**27.759.281.878,90**	**100,00**	**80,83**
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1	Laporan	34.341.333.031,00	1	27.759.281.878,90	100,00	80,83
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	**Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Benih/Bibit Tanaman**	**9170**	**Ha**	**10.269.564.952,00**	**11.189**	**7.524.969.746,00**	**122,02**	**73,27**
		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih (UPT PSBTPH)	Jumlah sertifikat	460	Sertifikat	232.441.966,00	308	226.777.000,00	66,96	97,56

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Holtikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1	Laporan	9.109.585.005,00	1	6.622.629.896,00	100,00	72,70
							-	-	-	-
		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Holtikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan (UPT PSBTPH)	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1	Laporan	927.537.981,00	1	675.562.850,00	100,00	72,83
							-	-	-	-
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**Persentase Peningkatan Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura**	**6,81**	**Persen**	**12.518.157.140,00**	1,17	**9.534.859.657,77**	**17,18**	**76,17**
		Penataan Prasarana Pertanian	**Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Penataan Prasarana Pertanian**	**1070**	**Ha**	**12.518.157.140,00**	**1.070**	**9.534.859.657,77**	**100,00**	**76,17**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan	1	Dokumen	2.932.031.805,00	1	1.357.356.535,43	100,00	46,29

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Pengelolaan Jalan Usaha Tani							
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1	Dokumen	5.175.173.335,00	1	4.064.008.869,34	100,00	78,53
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (UPTP PSBTPH)	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1	Unit	4.410.952.000	1	4.113.494.253,00	-	-
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura**	**6,81**	**Persen**	**927.851.569,00**	**1**	**856.411.986,00**	**17,18**	**92,30**
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	**Jumlah Luas Lahan yang Dikendalikan dan Ditanggulangi**	**2500**	**Ha**	**927.851.569,00**	**2.500**	**856.411.986,00**	**100,00**	**92,30**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2500	Ha	927.851.569,00	2.500	856.411.986,00	100,00	92,30
		Program Penyuluhan Pertanian	**Persentase Penyuluh yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**3**	**Persen**	**1.611.992.141,00**	**3**	**1.286.768.750,00**	**100,00**	**79,82**
		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah Penyuluh Pertanian yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi**	**240**	**Orang**	**461.997.212,00**	**165**	**317.583.750,00**	**68,75**	**68,74**
		Penyediaan dan peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang tersedia dan ditingkatkan kompetensinya	120	Orang	461.997.212,00	165	317.583.750,00	137,50	68,74
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani	**Jumlah Kelembagaan Koorporasi Petani**	**2**	**Unit**	**149.995.000,00**	**2**	**109.463.700,00**	**100,00**	**72,98**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		Berbasis Kawasan								
		Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	2	Unit	149.995.000,00	2	109.463.700,00	100,00	72,98
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang Dibina dan Diawasi**	**24**	**Kelompok**	**999.999.929,00**	**24**	**828.446.300,00**	**100,00**	**82,84**
		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	24	Kelompok	999.999.929,00	24	828.446.300,00	100,00	82,84
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		**5**	**Laporan**	**39.999.940,00**	**5**	**31.275.000,00**	**100,00**	**78,19**
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG	5	Laporan	39.999.940,00	5	31.275.000,00	100,00	78,19

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024			REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp
		dan Mikroorganisme	Tumbuhan dan Mikroorganisme							

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PTPH Provinsi Riau Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (good governance). Penyelenggaraan kegiatan di Dinas PTPH Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan dari Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dari analisis 2(dua) sasaran strategis, dengan 5(lima) indikator kinerja utama diketahui bahwa terdapat 2 indikator sasaran strategis yang tercapai, 3 tidak tercapai.

4.2. Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan Kinerja yang masa mendatang

Secara administrasi pelaksanaan kegiatan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mengikuti prognosis fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan/item pekerjaan sesuai dengan DPA yang telah disahkan
2. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan/item pekerjaan secara rutin
3. Peningkatan SDM melalui pelatihan

Untuk pencapaian kinerja strategis, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan setiap rumah tangga;**

Strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam daerah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, melakukan kerjasama dengan daerah tetangga untuk pemenuhan pokok pangan masyarakat, mengkoordinasikan dan mengembangkan cadangan pangan dan pemantapan kelembagaan pangan, meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan, kuantitas, gizi dan mutu.

2. **Meningkatkan Keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat (Distribusi);**

Untuk meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, dilakukan penanganan dalam bidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga, serta bantuan pangan dengan indikator keterjangkauan fisik, keterjangkauan ekonomi, dan, keterjangkauan/ kesesuaian social/budaya, kesesuaian terhadap preferensi, kesesuaian terhadap kebiasaan & budaya, kesesuaian terhadap agama.

3. **Meningkatkan Pemanfaatan dan Keamanan Pangan;**

Strategi pemanfaatan dan keamanan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bebasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan pangan segar dimana upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan denganagama, keyakinan, dan budaya masyarakat .

4. **Pembangunan Pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta Peningkatan luas panen dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan**

Strategi diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan produksi komoditas utama pertanian melalui peningkatan luas tanam (meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) untuk tanaman pangan, dengan melakukan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produksi, serta pengadaan alat mesin pertanian untuk mendukung percepatan tanam

5. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dengan menerapkan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan

Upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan produktifitas dengan peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dengan menerapkan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan dan Penerapan Teknologi Sapta Usaha Tani (penggunaan bibit unggul, teknik pengolahan lahan, pengaturan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama, pasca panen dan pemasaran hasil panen) , serta peningkatan prasarana pertanian dengan alsintan (alat pengolahan lahan, alat pasca panen dan alat pengolahan hasil)

6. Peningkatan kompetensi SDM aparatur / petani

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petugas/petani dan kelembagaan guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DANHORTIKULTURA
PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD JOB KURNIAWAN, AP., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RAHMAN HADI, M.Si
Jabatan : Pj. GUBERNUR RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2024

Pihak Kedua,
Pj. Gubernur Riau

Dr. Rahman Hadi, M.Si

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Muhammad Job Kurniawan, AP. ,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197505281994121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70.12%
2	Meningkatnya produksi TPH	Jumlah Produksi Padi (Ton)	436,203
		Jumlah Produksi Jagung (Ton)	40,382
		Jumlah Produksi Buah-buahan (Durian) (Ton)	23,814
		Jumlah Produksi Sayuran (Cabe) (Ton)	22,419
3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (skor)	72.95

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan	778,261,191.00	
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	645,549,655.00	
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	389,978,734.00	
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	60,171,486,738.00	
5.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	44,650,897,923.00	
6.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12,518,157,140.00	
6.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	927,851,569.00	
7.	Program Penyuluhan Pertanian	1,611,992,141.00	
	TOTAL APBD	**121,694,175,091.00**	

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (DK)	75,000,000.00	
2.	Direktorat Jendral Tanaman Pangan (DK)	1,813,396,000.00	
3.	Direktorat Jendral Hortikultura (DK)	986,146,000.00	
4.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (DK)	3,533,632,000.00	
5.	Badan Pangan Nasional	3,132,687,000.00	
TOTAL APBN (DEKONSENTRASI)		**9,540,861,000.00**	
1.	Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (TP)	37,668,435,000.00	
2.	Direktorat Jendral Tanaman Pangan (TP)	2,813,538,000.00	
3.	Direktorat Jendral Hortikultura (TP)	1,520,000,000.00	
TOTAL APBN (TUGAS PEMBANTUAN)		**42,001,973,000.00**	
TOTAL APBN		**51,542,834,000.00**	

Pekanbaru, November 2024

Pj. GUBERNUR RIAU

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Plt. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau

MUHAMMAD JOB KURNIAWAN, AP. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19750528 199412 1 001

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Update Tahun 2024

CSV JSON XLSX STATISTIK Data Prioritas Tersedia di Satu Data Indonesia

Sumber : Badan Pangan Nasional

Kerawanan Pangan dan Gizi | 5 bulan yang lalu | Indeks | 115 | Unduh

Deskripsi Metadata Grafik

Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah (provinsi). Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (provinsi).

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah (provinsi) dikelompokkan ke dalam enam kelompok, yaitu:

Prioritas 1 (Sangat Rentan), Prioritas 2 (Rentan), Prioritas 3 (Agak Rentan), Prioritas 4 (Agak Tahan), Prioritas 5 (Tahan), Prioritas 6 (Sangat Tahan)

BADAN PANGAN NASIONAL | NATIONAL FOOD AGENCY (NFA)

Beranda Dataset Visualisasi Infografis Publikasi SIP Daerah Katalog Jadwal Panduan Kontak

10 entries per page Search:

NO	KODE PROV	PROVINSI	TAHUN	IKP	PERINGKAT	KELOMPOK IKP
1	11	ACEH	2019	66.22	23	5
2	12	SUMATERA UTARA	2019	69.81	16	5
3	13	SUMATERA BARAT	2019	75.43	9	6
4	14	RIAU	2019	62.37	25	4
5	15	JAMBI	2019	68.23	19	5
6	16	SUMATERA SELATAN	2019	69.3	17	5
7	17	BENGKULU	2019	61.78	26	4
8	18	LAMPUNG	2019	71.36	15	5
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2019	56.03	29	3
10	21	KEPULAUAN RIAU	2019	59.26	28	4

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
JL. HR. SOEBRANTAS NO. 4 - PEKANBARU KODE POS : 28294
TELP. (0761) 7434974
E-mail : distanhor@riau.go.id Website : http://distanhor.riau.go.id

IKK *Outcome* No. 3.c.1
Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN	
1	$\frac{Jumlah\ Produksi\ Pertanian\ Pangan\ Tahun\ 2024}{Luas\ Panen\ (tanaman\ pangan)\ Tahun\ 2024}$	$\frac{293.468{,}40\ \text{Ton}}{61.970{,}28\ \text{Ha}}$	4,73 Ton/Ha

Pekanbaru, 31 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

MUHAMMAD JOB KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19750528 199412 1 001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
JL. HR. SOEBRANTAS NO. 4 - PEKANBARU KODE POS : 28294
TELP. (0761) 7434974
E-mail : distanhor@riau.go.id Website : http://distanhor.riau.go.id

PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN
DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

No	Kab/ Kota	Padi			Jagung			Kedelai			Kacang Tanah		
		Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	KUANTAN SINGINGI	4.964,49	44,50	22.090,91	81,40	34,62	281,77	11,75	14,67	17,24	33,00	13,15	43,41
2	INDRAGIRI HULU	919,55	40,51	3.724,87	10,50	34,03	35,73	0,10	15,02	0,15	32,45	14,05	45,58
3	INDRAGIRI HILIR	15.940,99	36,60	58.342,77	436,10	44,35	1.934,17	9,00	14,78	13,30	1,40	12,99	1,82
4	PELALAWAN	7.690,02	39,33	30.242,58	203,10	19,28	391,55	1,00	14,20	1,42	17,00	10,47	17,80
5	S I A K	5.886,27	43,83	25.802,01	165,80	35,18	583,25	0,30	14,20	0,43	11,20	14,74	16,51
6	KAMPAR	2.189,29	42,10	9.216,87	1090,00	33,36	3.635,76	24,00	14,86	35,68	163,00	15,25	248,61
7	ROKAN HULU	1.225,50	42,03	5.150,72	274,50	37,57	1.031,28	21,00	14,39	30,22	86,80	10,93	94,85
8	BENGKALIS	3.580,61	37,96	13.591,88	69,80	33,99	237,25	-	-	-	3,90	12,79	4,99
9	ROKAN HILIR	8.169,71	46,09	37.656,36	123,86	32,67	404,67	79,40	14,84	117,87	6,80	12,97	8,82
10	KEPULAUAN MERANTI	2.927,10	33,92	9.927,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KOTA PEKANBARU	5,09	42,58	21,68	195,25	31,60	616,92	14,00	15,02	21,03	2,00	12,57	2,51
12	KOTA DUMAI	2.923,35	24,99	7.306,73	62,75	34,55	216,80	20,00	15,02	30,05	4,05	12,85	5,20
JUMLAH		**56.421,96**	**39,54**	**223.075,20**	**2.713,06**	**34,53**	**9.369,14**	**180,55**	**14,81**	**267,38**	**361,60**	**13,55**	**490,10**

No	Kab/ Kota	Ubi Kayu			Uji Jalar			Kacang Hijau			Total		
		Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	KUANTAN SINGINGI	113,60	328,09	3.727,07	2,50	204,00	51,00		-		5.206,74	50,34	26.211,41
2	INDRAGIRI HULU	124,75	450,45	5.619,34	16,35	221,47	362,10		-		1.103,70	88,68	9.787,76
3	INDRAGIRI HILIR	213,25	223,52	4.766,48	91,25	210,12	1.917,34		-		16.691,99	40,12	66.975,89
4	PELALAWAN	83,70	170,67	1.428,54	6,00	222,69	133,61		-		8.000,82	40,27	32.215,50
5	S I A K	82,80	282,40	2.338,29	7,10	256,55	182,15		-		6.153,47	47,00	28.922,64
6	KAMPAR	443,00	205,87	9.120,06	39,00	222,58	868,06		-		3.948,29	58,57	23.125,04
7	ROKAN HULU	187,55	264,38	4.958,52	76,00	212,71	1.616,57		-		1.871,35	68,84	12.882,15
8	BENGKALIS	362,69	305,04	11.063,51	18,99	210,21	399,20		-		4.035,99	62,68	25.296,82
9	ROKAN HILIR	120,78	291,55	3.521,36	13,79	224,33	309,35		-		8.514,34	49,35	42.018,42
10	KEPULAUAN MERANTI	74,00	215,76	1.596,63	-	-	-		-		3.001,10	38,40	11.524,45
11	KOTA PEKANBARU	101,22	321,02	3.249,40	2,49	205,35	51,13		-		320,05	123,81	3.962,67
12	KOTA DUMAI	112,30	265,97	2.986,88	-	-	-		-		3.122,45	33,77	10.545,66
JUMLAH		**2.019,64**	**269,24**	**54.376,08**	**273,47**	**215,40**	**5.890,51**	**-**	**-**	**-**	**61.970,28**	**47,36**	**293.468,40**

Catatan : Data di atas masih angka sementara (olahan dinas)

Pekanbaru, 31 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

MUHAMMAD JOB KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19750528 199412 1 001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 2300 FAX. (0761) 23256
PEKANBARU

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS INTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023
PADA
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU

NOMOR : 235/LHE/INSP- RIAU/Ir.III/VI/2024
TANGGAL : 28 Juni 2024

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

Pekanbaru, 28 Juni 2024

Nomor : 235/LHE/INSP- RIAU/Ir.III/VII/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2023

Yth. Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau
di Pekanbaru

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil *(result oriented government)*.

Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dipindai dengan CamScanner

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada Perangkat Daerah (PD) Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

1) Menyesuaikan pohon kinerja dengan Permenpan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
2) Mengidentifikasi *croscutting.*

b. Pengukuran Kinerja

Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dimanfaatkan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien.

c. Pelaporan Kinerja

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau memanfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar **0,2** dari tahun 2022 sebesar **71,95** sehingga nilai tahun 2023 menjadi **72,15** dengan predikat **BB** (rincian terlampir). Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi

Dipindai dengan CamScanner

akuntabilitas kinerja "**sangat baik**", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80	30	25,50
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,90	30	16,80
3.	Pelaporan KInerja	15	12,00	15	12,60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,25	25	17,25
	Nilai Hasil Evaluasi		**71,95**		**72,15**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**		**BB**

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2023 sebagaimana terlampir, dengan rincian sebagai berikut:

a. **Perencanaan Kinerja**

Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau telah memperbaiki sistem manajemen kinerja, Hal tersebut ditunjukkan dengan telah tersedianya dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar yang baik dan perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. **Pengukuran Kinerja**

Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau telah menginput data pada aplikasi SIAPADIA sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkala. Namun demikian, kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan

Dipindai dengan CamScanner

punishment, serta belum ada penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

c. Pelaporan Kinerja

Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023. Laporan kinerja tersebut telah menggambarkan kinerja, memenuhi standar kualitas atas pencapaian kinerja, menyajikan informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Namun dokumen laporan kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau pada Evaluasi Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan pada seluruh bidang/sub unit dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau agar:

a. Perencanaan KInerja

Melakukan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala.

b. Pengukuran Kinerja

Agar pada pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Dipindai dengan CamScanner

c. Pelaporan Kinerja

Menyajikan laporan kinerja yang memuat analisis capaian kinerja terhadap sasaran strategis PD, analisis perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta analisis realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional;

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1) Agar Evaluasi Kinerja Internal dilaksanakan pada seluruh bidang/sub unit;
2) Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara berkualitas oleh sumber daya dengan pendalaman yang memadai.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU

SIGIT JULI HENDRIAWAN SE, MM, CA, CRMP, QGIA
Pembina Utama Madya
NIP. 19710729 199302 1 003

Tembusan Yth:

1. Pj. Gubernur Provinsi Riau;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR KERJA EVALUASI OPD
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	
1	**PERENCANAAN KINERJA**	**30,00**	**25,50**	**85,00%**
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan	9,00	8,10	90,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,00	80,00%
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30,00**	**16,80**	**56,00%**
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6,00	100,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	6,30	70,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	4,50	30,00%
3	**PELAPORAN KINERJA**	**15,00**	**12,60**	**84,00%**
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	3,00	100,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,60	80,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00	80,00%
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25,00**	**17,25**	**69,00%**
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	80,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	4,50	60,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,75	70,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**72,15**	

Dipindai dengan CamScanner